

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000, *Penjelasan Singkat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*, Bahan Ceramah:Penyegaran Bagi Atasan Langsung Bendaharawan Dan Bendaharawan Pada Kantor/Satuan Kerja Di Jajaran Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Diperbanyak Oleh Biro Keuangan Setjen Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Semarang.

Bagus, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia.

Baswir, Revrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta

Didit, 2016. “*Definisi Pengadaan Barang*” diakses dari <http://diditnote.blogspot.co.id> pada tanggal 23 Februari 2016.

Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN Yogyakarta.

*Keputusan gubernur jawa tengah nomor 39 tahun 2002 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi.*

*Keputusan gubernur jawa tengah nomor 72 tahun 2004 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2005.*

*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 954/705/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pemegang Kegiatan pada Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah.*

*Keputusan Kepala Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah Nomor 038/04.G/1.3/2005 Tanggal 6 Januari 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembantu Pengurus Barabg untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.*

*Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 1960.*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004.*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.*

- Maywuha, Kusuma, Dharma, 2013. “*Prakualifikasi dan Pascakualifikasi*” diakses dari <http://documents/prakualifikasi-dan-pascakualifikasi.html> pada tanggal 23 Februari 2016.
- Nadjamuddin, 2000, *Mekanisme Sistem UYHD*, Bahan Ceramah: Penyegaran Bagi Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Pada Kantor/Satuan Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Diperbanyak Oleh Biro Keuangan Setjen Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Semarang.
- Pamudji, 1976, *Sistem Informasi*. PT. Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 2 Februari 2005 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005.*
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan.*
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan.*
- Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 4090).*
- Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2002.*
- Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Peringkat Daerah.*
- Propinsi Jawa Tengah, 2002, *Pedoman Bendaharawan Pengelola Daerah Pengawasan Keuangan Daerah*, CV. Eka Jaya, Jakarta.
- Propinsi Jawa Tengah, *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah.*
- Republik Indonesia, 2003, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, CV Eko Jaya, Jakarta.
- Santosa, 1952, *Memburu tikus-tikus Otonom*, Yogyakarta: Gava Media Cetakan Pertama, halaman 44.

*Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 5 Februari 2001 Nomor 91/2365 Perihal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.*

Republik Indonesia, 1945, *Undang-Undang Dasar 1945.*

Republik Indonesia, 1950, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.*

Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.*

Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437.*

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839).*

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438.*